



PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DALAM ISLAM

Radita Meilindika¹, Arin Khairunnisa²

¹Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibn Khaldun Bogor
Prodi Pendidikan Masyarakat

²Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibn Khaldun Bogor
Prodi Pendidikan Masyarakat

E-mail : raditameilindika22@gamil.com

Article History:

Received: 26-05-2024

Revised: 20-06-2024

Accepted: 27-06-2024

Keywords:

Pemberdayaan, Ekonomi,
Islam

Abstract: Agama Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk berusahamendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat agar dapat tercapai kesejahteraan lahir dan batin. Karenanya tidak berlebihan jika agama Islam juga dapat dikatakan sebagai agama pemberdayaan, yang berupaya memberdayakan pemeluknya untuk dapat hidup yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan data. Penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis pada jurnal-jurnal terkait dengan pemberdayaan ekonomi dalam islam. Untuk memperolehnya, perlu adanya pemberdayaan yang sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan, bahkan sebagai kekuatan pembebas (liberating force) terutama dari ketertinggalan dan ketertindasan ekonomi.

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, agama Islam mengajarkan penganutnya untuk berusaha menjalani kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika agama Islam juga dianggap sebagai pemberdayaan agama, karena tujuannya adalah untuk memberi kesempatan bagi pemeluknya untuk hidup seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Untuk mencapainya, pemberdayaan harus disesuaikan dengan paradigma Islam sebagai agama gerakan atau perubahan, bahkan sebagai kekuatan pembebas (liberating force) terutama dari ketertinggalan dan memikirkan ekonomi (Upaya et al., n.d.)

Sejauh ini masyarakat Islam khususnya Indonesia sebagai umat mayoritas, masih terlalu jauh dari segala keunggulan bila dibandingkan dengan umat di negara-negara lain, khususnya negara barat yang notabenenya kristen terutama perekonomiannya. Bahkan sangat disayangkan, di kalangan masyarakat Islam telah terjadi ketimpangan ekonomi yang menyebabkan sirkulasi kekayaan hanya berputar di sekelompok borjuis saja.

Fakta ini menuntut adanya upaya-upaya pemberdayaan ekonomi yang sistematis dan terus-menerus untuk melahirkan masyarakat yang egaliter secara ekonomi dan

sirkulasi kekayaan dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Karenanya, diperlukan terobosan-terobosan ataupun metode-metode pemberdayaan yang mengenai.

Menurut gagasan Taqiyuddin al-Nabhani, Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya di segelintir orang (orang kaya saja) atau sistem konglomerasi. Apabila dalam suatu masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar dalam memenuhi kebutuhannya (seperti sekarang ini), maka negara mengambil tindakan untuk mencegahnya, dengan menciptakan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat. Di dalam al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 59 telah disebutkan: "... Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (Ilmiah & Islam, 2022).

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan ekonomi umat dalam Islam merupakan konsep yang integral dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, tanggung jawab sosial, dan solidaritas di antara umat. Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam seperti keadilan (al-adl), kesetaraan (al-musawah), tanggung jawab sosial (fard kifayah), dan solidaritas (takaful) menjadi dasar bagi upaya pemberdayaan ekonomi. Melalui prinsip-prinsip ini, Islam mendorong pencapaian keseimbangan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial.

Instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, sedekah, wakaf, dan qard hasan berperan penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Zakat, sebagai kewajiban finansial bagi setiap Muslim yang mampu, bertujuan untuk membantu golongan yang kurang beruntung dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Sedekah, yang sifatnya sukarela, memberikan peluang bagi individu untuk berkontribusi dalam membantu sesama. Wakaf, sebagai pemberian aset untuk kepentingan umum, dapat digunakan untuk membangun fasilitas sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Qard hasan, sebagai pinjaman tanpa bunga, memberikan bantuan finansial bagi mereka yang membutuhkan tanpa menambah beban.

Dalam konteks modern, implementasi pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi syariah, dan peran lembaga keuangan syariah. Pendidikan dan pelatihan keterampilan membantu meningkatkan kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dukungan terhadap UMKM melalui modal dan akses pasar membantu usaha kecil berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi umat. Koperasi syariah, berdasarkan prinsip kerjasama ekonomi syariah, dan lembaga keuangan syariah berperan dalam mengelola dana umat dan menyalurkannya untuk kegiatan ekonomi produktif. Melalui upaya-upaya ini, pemberdayaan ekonomi umat dalam Islam dapat tercapai, menghasilkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan data. Penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis pada jurnal-jurnal terkait dengan pemberdayaan ekonomi dalam islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil percobaan sebaiknya ditampilkan dalam berupa grafik atau pun tabel. Untuk grafik dapat mengikuti format untuk diagram dan gambar. (Calisto MT, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1)

Terdapat banyak definisi pemberdayaan ekonomi umat di banyak literatur yang dikemukakan oleh para ahli. Para ahli menggunakan kata “masyarakat” untuk menunjuk makna “umat”. Dari segi kebahasaan, pemberdayaan merupakan terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut Oxford English Dictionary, kata empower memiliki dua arti, yaitu: (1). to give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan (Yang et al., 2020).

Sedangkan dari segi istilah (terminologi), banyak ahli yang menawarkan definisi pemberdayaan. Variasi definisi mengenai pemberdayaan bisa dijumpai di banyak literatur. Beberapa ahli memakai langsung memakai frase “pemberdayaan ekonomi”.

Hutomo menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan dengan multiaspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya. Definisi di atas banyak dipakai oleh kalangan pemerintah.

Di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, wacana pemberdayaan muncul Ketika pembangunan yang dilaksanakan pemerintah menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa. Penguasa memiliki akses yang lebih besar untuk menguasai kegiatan-kegiatan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi banyak pihak dalam masyarakat. Hal-hal di atas akhirnya memunculkan dikotomi, yang membedakan antara masyarakat yang berkuasa dan masyarakat yang dikuasai. Untuk membebaskan masyarakat dari situasi ini, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment of the powerless). Ini adalah alasan awal mengapa pemberdayaan dinilai penting untuk dilakukan.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (freedom); (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan; dan (c) berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah/rentan. Para ahli mengemukakan bahwa bahasan mengenai pemberdayaan hendaknya ditinjau dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yang dilakukan yang meliputi (Setiyowati, 2017).

- Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung.
- Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengannya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.

- Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.
- Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi adalah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan ekonomi adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah (kondisi ekonominya) dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai, dan konsep mengenai tujuan pemberdayaan ini seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Bila konsep pemberdayaan di atas dilekatkan mendahului konsep ekonomi, maka didapati konsep baru yang lebih sempit dan spesifik. Pemberdayaan ekonomi merupakan kegiatan memberi kekuasaan pada pihak ke-dua (sasaran pemberdayaan) agar menjadi mampu dalam bidang ekonomi.

Problem perekonomian dalam negara berkembang Bagaimanapun

Bagaimanapun juga, antara ekonomi dengan politik tidaklah bisa dipisahkan, terutama jika sudah menyangkut partisipasi dalam mengembangkan masyarakat, karena prinsip partisipasi ini tentunya berkaitan dengan ideologi ekonomi suatu masyarakat. Sehingga dalam perkembangannya muncul beberapa pandangan mengenai partisipasi tersebut. Pandangan pertama melahirkan pendapat tentang perlunya terlebih dahulu dikembangkannya demokrasi politik, sehingga masyarakat akan memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan kreasi dan inovasinya dalam kegiatan ekonomi, dan hal ini juga terkait dengan demokrasi ekonomi yang berarti kebebasan dalam berusaha. Pandangan kedua melahirkan pendapat bahwa yang penting adalah pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, walaupun dengan mengorbankan demokrasi politik untuk sementara waktu (Anwar, 2008).

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, ternyata dalam prakteknya lebih mengarah pada pandangan yang kedua. Hal ini terjadi karena ada pandangan bahwa demokrasi politik membutuhkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ekonomi, di antaranya: pertama, tingkat pendapatan masyarakat. Dengan pendapatan yang besar, negara atau masyarakat bisa mengeluarkan biaya dalam usaha meningkatkan mutu pendidikannya, sehingga bisa memperluas partisipan demokrasi yang sehat. Dengan kata lain, ketika seseorang sudah bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, maka dia akan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan melakukan partisipasi dalam kehidupan politik. Kedua, bahwa bantuan dari pemerintah yang selama ini diberikan pada masyarakat justru malah menciptakan situasi ketergantungan. Motivasi masyarakat akan tergantung oleh rangsangan yang berupa materiil, sehingga partisipasi masyarakat hanya terjadi pada sektor-sektor yang mendapat bantuan dari pemerintah. Ketiga, perlunya lembaga-lembaga yang bisa merangsang peran serta masyarakat sendiri. Lembaga-lembaga ini bertujuan untuk menyediakan wadah partisipasi bagi masyarakat, yaitu wadah yang lebih bisa mempersatukan dan bisa mencegah terjadinya konflik, seperti KUD, PKK, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga ini harus disetting sedemikian rupa sehingga masyarakat benar-benar merasa memilikinya dan ikut bertanggungjawab mengelola dan mengembangkannya (Setiyowati, 2017).

1) Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Untuk mengetahui maksud dari pemberdayaan ekonomi umat, perlu dikemukakan tentang pemberdayaan itu sendiri. Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. Pertama, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain (Fathoni & Rohim, 2019).

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan Sementara itu umat Islam sendiri merupakan 87% dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun horisontal, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat Islam.

Kedua, Kedua, yang dimaksud perekonomian umat itu adalah sektor-sektor yang dikuasai oleh muslim-santri. Batasan ini mempunyai masalah tersendiri, karena sulit membedakan mana yang Islam dan mana pula yang abangan. Sebagai contoh, apakah seorang pengusaha besar tertentu yang dikenal kesalehannya, dapat digolongkan ke dalam pengusaha santri? Jika menengok bahwa ia menjalankan shalat, maka ia dapat dikategorikan sebagai santri, tetapi ia tidak masuk ke dalam anggota maupun pendukung gerakan Islam, maka ia bukan santri atau Islam fungsional (Syariah, n.d.).

2) Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya.

Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.

Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang- peluang ekonomi.
- c) Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi

golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

Melalui langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi umat berlangsung secara cepat. Strategi berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural yang selanjutnya dapat memperkuat kedudukan dan peran ekonomi umat dalam perekonomian nasional (Pesantren, n.d.).

Memberdayakan ekonomi umat secara proporsional sama dengan memberdayakan ekonomi rakyat. Karenanya, tidak heran jika aspek pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi tema sentral bagi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus pula ditunjukkan pada perbaikan keadilan. Aspek keadilan ini harus diterjemahkan dalam konsep ekonomi dan secara politis dapat diterima.

3) Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat

Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat, perlu dijelaskan pengertian ekonomi Islam terlebih dahulu. Sebagian ahli memberi definisi bahwa ekonomi Islam adalah madzhab ekonomi yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditunjukkan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri atas nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.

Sebagian lainnya berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Atau sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam (Setiawan, 2017).

Masalah ekonomi memang selalu menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Meskipun demikian, usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh.

Kebanyakan penelitian yang dihasilkan telah menyimpang jauh dari motivasi semula sehingga menghilangkan tujuan sebenarnya. Di satu pihak pendapat yang menyarankan ke arah itu terlalu mementingkan hak individu dan mengesampingkan kepentingan masyarakat umum. Di lain pihak pendapatnya menolak keistimewaan hak individu. Oleh karena itu, di sini perlu diterangkan prinsip dasar berbagai sistem ekonomi yang penting, misalnya sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam itu sendiri. Kemudian dibandingkan untuk memposisikan bahwa sistem ekonomi Islamlah sebagai alternatifnya (Ekonomi, n.d.).

KESIMPULAN

Agama Islam mengajarkan penganutnya untuk berusaha menjalani kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika agama Islam juga dianggap sebagai pemberdayaan agama, karena tujuannya adalah untuk memberi kesempatan bagi pemeluknya untuk hidup seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

Perilaku manusia yang bisa mengakibatkan ketidakberdayaan di bidang ekonomi sangat bertentangan dengan semangat kerja yang dianjurkan oleh Islam. Islam menganjurkan agar manusia memanfaatkan potensi dirinya (Sumber Daya Manusia) dan potensi alam (Sumber Daya Alam) dalam bekerja. Pemanfaatan potensi diri semaksimal mungkin dalam bekerja akan membawa kepada keberdayaan ekonomi manusia sehingga mereka menjadi kelompok yang kuat (berdaya), kelompok yang disukai oleh Allah.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini. Kami juga berterimakasih kepada para pembaca jurnal ini ,semoga jurnal ini memberikan manfaat kepada para pembaca.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Anwar, M. K. (2008). *Ekonomi dalam perspektif islam*. 3(1), 26–35.
- [2] Ekonomi, D. A. N. P. (n.d.). *FILANTROPI ISLAM*.
- [3] Fathoni, M. A., & Rohim, A. N. (2019). *Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia*. 133–140.
- [4] Ilmiah, J., & Islam, E. (2022). *Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di MWC NU Dukun dan Panceng Gresik*. 8(03), 2456–2472.
- [5] Pesantren, D. I. (n.d.). *Membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren*. VI, 37–56.
- [6] Setiawan, H. (2017). *Manajemen Komunikasi Dompot Ummat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam*. 1, 89–110. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v1i1i1.1356>
- [7] Setiyowati, A. (2017). *DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (Studi Kasus Lazismu Surabaya)*. 2(1).
- [8] Syariah, D. E. (n.d.). *PENINGKATAN PRODUKSI DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM SEBAGAI UPAYA*. 39–76.
- [9] Upaya, S., Jaelani, D. I., Jonggat, S., & Ntb, L. (n.d.). *No Title*.
- [10] Yang, T., Esa, M., & Indonesia, D. (2020). *Kata Kunci : ziswaf, NU Care Lazisnu, Pemberdayaan Ekonomi*. 1(1), 9–18.